

Hukum Acara Perdata Yahya Harahap

Getting the books **Hukum Acara Perdata Yahya Harahap** now is not type of inspiring means. You could not lonely going subsequently books deposit or library or borrowing from your friends to door them. This is an extremely easy means to specifically get lead by on-line. This online broadcast Hukum Acara Perdata Yahya Harahap can be one of the options to accompany you similar to having additional time.

It will not waste your time. admit me, the e-book will definitely sky you supplementary situation to read. Just invest little mature to admittance this on-line declaration **Hukum Acara Perdata Yahya Harahap** as capably as review them wherever you are now.

Hukum Acara Pengadilan Niaga - Andika Wijaya, S.H., 2022-02-17

Buku ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para Pembaca tentang hukum acara Pengadilan Niaga, baik dari segi teori maupun praktik. Sebagai buku petunjuk praktis (practical guide), pemaparan materi yang bersifat praktis lebih mendominasi dalam buku ini. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan bagi para praktisi hukum, baik di Pengadilan Niaga (Hakim Niaga, dan perangkat pengadilan: Panitera, dan seterusnya), para Advokat, Konsultan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Konsultan Hukum Perusahaan, dan lainnya. Sebagai buku panduan yang bersifat praktis, buku ini akan mudah dipahami dan diterapkan oleh para Pembaca, sehingga cocok pula untuk dimiliki oleh Mahasiswa dan masyarakat awam pada umumnya.

Direct Jurisdiction - Anselmo Reyes 2021-08-26

The second thematic volume in the series Studies in Private International Law - Asia looks into direct jurisdiction, that is, the situations in which the courts of 15 key Asian states (Mainland China, Hong Kong, Taiwan, Japan, South Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, the Philippines, Indonesia, Sri Lanka, and India) are prepared to hear a case involving cross-border elements. For instance, where parties are habitually resident abroad and a dispute has only some, little or no connection with an Asian state, will the courts of that state accept jurisdiction and hear the case and (if so) on what conditions? More specifically, the book's chapters explore the circumstances in which different Asian states assume or decline

jurisdiction not just in commercial matters, but also in other types of action (such as family, consumer and employment disputes). The Introduction defines terminology and identifies similarities in the approaches to direct jurisdiction taken by the 15 Asian states in civil and commercial litigation. Taking its cue from this, the Conclusion assesses whether there should be a multilateral convention or soft law instrument articulating principles of direct jurisdiction for Asia. The Conclusion also discusses possible trajectories that Asian states may be taking in respect of direct jurisdiction in light of the COVID-19 pandemic and the political tensions currently besetting the world. The book suggests that enacting suitable rules of direct jurisdiction requires an Asian state to strike a delicate balance between affording certainty and protecting its nationals. At heart, direct jurisdiction involves sometimes difficult policy considerations and is not just about drawing up lists of jurisdictional grounds and exceptions to them.

Upaya Hukum Keberatan dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana - Emma Aulia, S.H 2019-07-01

Adagium yang berkembang dimasyarakat terkait dengan penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan adalah "jika kita menuntut kambing, maka akan kehilangan kerbau" artinya apa yang kita tuntut tidak akan sebanding dengan waktu, biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Lamanya proses dan mekanisme yang rumit serta berbelit-belit selalu dikeluhkan oleh para pencari keadilan yang sedang berperkara di Pengadilan, terkait dengan sengketa perdata yang dihadapi,

sehingga bagi nilai sengketa yang kecil menjadi tidak efektif untuk memilih forum penyelesaian melalui lembaga Peradilan.

Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters - Anselmo Reyes
2019-09-19

This collection offers a study of the regimes for the recognition and enforcement of foreign commercial judgments in 15 Asian jurisdictions: mainland China, Hong Kong, Taiwan, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, the Philippines, Indonesia, Sri Lanka and India. For practising lawyers, the book is intended as a practical guide to current law and procedures for enforcing judgments in the selected jurisdictions. However, it does not stop at describing current law and practice. Of interest to academics and students, it also analyses the common principles of the enforcement regimes across the jurisdictions, and identifies what should be regarded as the norm for enforcement in Asian countries for the purpose of attracting foreign direct investment and catalysing rapid economic development. In light of the common principles identified, the book explores how laws in Asia may generally be improved to enable judgments to be more readily enforced, while ensuring that legitimate concerns over indirect jurisdiction, due process and domestic public policy are respected and addressed. With this in mind, the book discusses the potential impact that the adoption of the 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements might have on Asian jurisdictions; it also considers the potential impact of the convention for the enforcement of judgments in civil and commercial matters presently being drafted by the Hague Conference on Private International Law. This timely book argues that it is imperative to adopt a uniform system for the recognition and enforcement of judgments throughout Asia if there is to be traction for the enhanced cross-border commerce that is expected to result from endeavours such as the ASEAN Economic Community (AEC), the Belt and Road Initiative (BRI), CPTPP (also known as TPP-11), and RCEP.

Hukum Acara Perdata Di Indonesia - Endang Hadrian
2020-08-01

Buku ini didasarkan pada pengalaman penulis sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan mata kuliah yang diampu: Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata dan PLKH Perdata. Buku ini terdiri dari 9 (sembilan) bab, berisi sebagai berikut: Bab I tentang Pengertian, Asas dan Sumber Hukum Acara Perdata, Bab II tentang Gugatan, Bab III tentang Kompetensi (Kewenangan Mengadili), Bab IV tentang Pemeriksaan Gugatan di Persidangan, Bab V tentang Pembuktian, Bab VI tentang Putusan Pengadilan, Bab VII tentang Upaya Hukum, Bab VIII Eksekusi, dan Bab IX tentang Mediasi. Hukum Acara Perdata Di Indonesia:

Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

HUKUM ACARA PERDATA Dalam Teori dan Praktik - Dr. Miswardi, S.H., M.Hum.
2021-05-01

Buku ini ditulis sebagai wujud tanggung jawab ilmiah penulis sebagai dosen yang mengajar hukum acara perdata sudah lebih dari lima belas tahun di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan pengalaman praktik sebagai advocat. Oleh karena itu buku ini penulis susun dalam bentuk yang sangat sederhana dan mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya terutama bagi mahasiswa fakultas hukum atau fakultas syariah, juga bagi para pengacara pemula buku ini dapat dijadikan referensi dalam menangani perkara perdata baik secara litigasi maupun non litigasi.

Essays & commentaries on Indonesian Law - Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. 2022-02-08
Indonesian Law In A Remarkably Complex Mixture Of National Legislation And International Legislation. The Work Of This Book Is Organized Loosely And Is Designed To Contribute Indonesian Law Knowledge About : • To Anticipate Change Of Law Paradigm As Result Of Global Development (Chapter I), • Agrarian Law Enforcement And Settlement Of Land Affairs Dispute In Judiciary Process (Chapter II), • Efforts For Land Affairs Dispute And Realization Of Court's Rule Which Had Permanent Legal Power At North Sumatra (Chapter III), • Role Of Justice As Agent Of Judicial Reform To Increase Rule Quality (Chapter IV), • Judicial Review Against Regulations Which Of Level And Degree Under The Laws (Chapter V), • Compensation As Result

Of Governmental Apparatus Commitment Regulated In Bill Of Governmental Administrative Affairs And Prospect Of (Chapter VI), • ?????? (Chapter VII), • Judicature Competency Of State Law Administration To Resolve Conflict Of Public Information (Chapter VIII).

Perampasan harta hasil korupsi: perspektif hukum pidana yang berkeadilan - Supardi 2018-01-01

Negara sebagai representasi warga negara atau masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana korupsi.

Pengambilan uang negara secara melawan hukum oleh pelaku tindak pidana korupsi dan para pihak yang menikmati akan menghambat hak-hak warga negara (masyarakat) untuk mendapatkan pelayanan pembangunan dengan uang negara—yang diambil dan dinikmati secara melawan hukum—tersebut. Tujuan daripada penegakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain untuk menindak atau menghukum para pelaku tindak pidana korupsi, juga adalah dalam rangka penyelamatan aset/harta negara atau pemulihan kerugian (asset recovery) negara yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi. Buku persembahan penerbit Prenada Media

MODUL PRAKTIK ACARA PERDATA - Dr. Novyta Uktolseja, SH., MKn. 2022-09-01

Buku ini berjudul "MODUL PRAKTIK ACARA PERDATA", berisikan materi hukum acara dan praktek peradilan perdata dalam mengikuti perkuliahan.

Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia - Dr. Titik Triwulan T., S.H. 2016-01-01

Supremasi hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dimaksudkan agar penyelenggara (administrasi) negara dan para penegak hukum tidak mengabaikan ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebab, salah satu faktor utama keterpurukan proses hukum dan peradilan di Indonesia disebabkan oleh pelaksanaan hukum dan penegakan hukum yang acap kali mengabaikan rasa keadilan masyarakat, dan hanya terpaku pada formalitas dan , prosedur hukum semata. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Konsep Hukum Indonesia - Mohamad Hidayat Muhtar 2023-05-06

Sejarah Tata Hukum Indonesia, Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Sumber-sumber Hukum di Indonesia, Konsep Hukum Perdata, Konsep Hukum Acara Perdata, Konsep Hukum Pidana, Konsep Hukum Acara Pidana, Konsep Hukum Tata Negara, Konsep Hukum Administrasi Negara, Konsep Hukum Dagang, Konsep Hukum Ketenagakerjaan, Konsep Hukum Pajak di Indonesia, Konsep Hukum Internasional, Konsep Hukum Adat, Konsep Hukum Bisnis, Konsep Hukum Syariah, Konsep Hukum Keluarga, Hukum Transportasi Indonesia.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi - Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. 2021-12-27

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi. Di sisi lain, penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menggunakan konsepsi membentuk MK untuk mengadili kewenangan dan kewajiban yang ada padanya, tidak dengan memberikan kewenangan itu kepada MA. Oleh karena itu adalah beralasan untuk menyebut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dikarenakan sarat persepsi kelembagaan. Meskipun demikian, tetap dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Buku ini sangat relevan dengan perkembangan hukum saat ini karena didasarkan pada peraturan Mahkamah Konstitusi terbaru (Peraturan MK Tahun 2021) serta menyajikan wawasan dan keilmuan yang mumpuni. Buku ini juga disusun untuk memfasilitasi kehendak untuk memahami dua hal; pertama, kelembagaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutus (Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945). Kedua, memahami bagaimana hukum acara dalam pelaksanaan kewenangan dan kewajibannya.

Hukum Acara Perdata Dan Praktik Peradilan Perdata - Asman 2023-02-22
Konsep, fungsi, tujuan dan sumber-sumber

Hukum Acara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata, Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia beserta kompetensinya, Teknik dalam membuat Surat Kuasa, Nilai bukti dari setiap jenis alat bukti dan teori beban pembuktian, Fungsi, tujuan dan jenis-jenis sita (penyitaan), Fungsi, tujuan dan jenis-jenis putusan hakim, Jenis-jenis putusan (eksekusi) dan tahapan-tahapan penyelesaian perkara serta evaluasi proses beracara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama.

Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata - Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H.

Buku ajar ini disusun mengikuti alur proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, karena memang demikianlah seharusnya dalam mempelajari materi-materi hukum acara. Tentunya pembahasan diawali dengan hal-hal yang mendasar mengenai ruang lingkup hukum acara perdata berikut dengan asas-asasnya. Pembahasan berikutnya berturut-turut mengenai surat kuasa khusus, surat gugatan, acara-acara istimewa, pembuktian, sita jaminan, putusan, upaya hukum, dan yang terakhir mengenai eksekusi. Kemudian selanjutnya diberikan contoh penyusunan surat di pengadilan, yang diawali dari Surat Kuasa Khusus, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Surat Jawaban I Tergugat, berbagai memori untuk kepentingan upaya hukum, hingga surat permohonan eksekusi. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat dan sesuai terutama bagi para mahasiswa yang hendak mempelajari Hukum Acara Perdata. ***

Persembahkan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
HUKUM ACARA PERDATA TEORI DAN PRAKTIK - Dede Hafirman Said 2022-11-26

Buku ini penulis sajikan mengingat bahwa isi dan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sulit untuk dimengerti tentang makna yang sebenarnya terkandung didalamnya. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda yang diberlakukan bagi Bangsa Indonesia sesuai dengan aslinya dan tidak diolah kedalam bahasa hukum sederhana dan mudah di mengerti oleh setiap orang yang mempelajarinya. Dalam praktiknya pun banyak menimbulkan kesulitan bagi siapa saja yang mempelajarinya, terlepas

apakah mereka itu hakim, praktisi, dosen dan mahasiswa hukum, sehingga membuat penulis tergugah untuk memaparkan dalam bentuk buku tentang Hukum Acara Perdata di Indonesia dalam Teori dan Praktik dengan maksud agar mudah dipelajari dan dimengerti oleh para pembaca, dengan demikian dapat menjadi jembatan dalam penegakan rule of law di Indonesia.

Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2 - Muhammad Bakri 2013-10-30

Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia atas dua jilid yaitu, jilid 1 tentang "Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi" dan jilid 2 tentang "Asas-asas Hukum yang Berlaku Di Indonesia". Dalam buku jilid 1 berisi, gambaran umum namun cukup jelas tentang hukum yang berlaku di Indonesia pada era Reformasi yang merupakan salah satu sistem (Sistem hukum positif Indonesia). Dalam sistem hukum positif Indonesia terdiri atas 3 komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi yaitu, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan hukum adat serta hukum kebiasaan. Dengan mengetahui dan memahami komponen-komponen dalam sistem hukum positif Indonesia itu, diharapkan para pembaca dapat mengetahui dan memahami semua hal yang berkaitan dengan hukum yang sedang berlaku di Indonesia secara garis besar. Dalam buku jilid 2 membahas tentang asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum yang sedang berlaku di Indonesia, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dengan maksud untuk memberi bekal bagi para pembaca dalam mempelajari dan mendalami hukum positif Indonesia.

PRAKTIK BERACARA DI PERADILAN AGAMA - Ecep Nurjamal, SH., MH 2020-11-19

Peradilan Islam di Indonesia pada dasarnya untuk mencari keadilan khusus bagi orang yang beragama Islam. Dalam praktik acara di Peradilan Agama mengacu kepada Hukum Acara dan peraturan perundang-undangan seperti halnya pada Peradilan Umum, hanya saja dalam Peradilan Agama materi dan sifatnya terbatas, adapun tujuan praktik di Peradilan Agama yaitu pada acara dan penerapan hukumnya. Hukum Acara Peradilan Agama yang berlaku di pulau Jawa dan Madura diberlakukan Hukum Acara Perdata "Herzien Inlandsch Reglemen" (HIR/RIB) dan untuk diluar pulau Jawa dan

Madura Hukum Acara Perdata yang dipakai ialah "Rechtreglement Voor de Buitengewesten" (RBG). Buku ini sebagai salah satu materi dalam praktik beracara di Pengadilan Agama serta pemecahan masalahnya dan buku ini dapat dijadikan pula sebagai bahan acuan materi kuliah bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum atau prodi Akhwal As-syahsiyah (Syari'ah) dan Hukum Tata Negara (Siyasah) termasuk teknis yustisial bagi para penegak hukum atau praktisi hukum (Hakim dan Advokat) serta para pihak yang berkepentingan dalam mencari keadilan khususnya dilingkungan Peradilan Agama selain itu diharapkan adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan bagi para mahasiswa jurusan ilmu hukum dan Advokat dalam melakukan praktik beracara di Peradilan Agama; Hasil pemantauan di lapangan melalui eksaminasi maupun penemuan lainnya di lingkungan Peradilan Agama menurut penulis terdapat adanya kekosongan hukum misalnya dalam KHI tentang kedewasaan menurut hukum, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termuat mengenai pengesahan perkawinan dibawah tangan setelah tahun 1974 dan selain itu perlu adanya pelatihan di bidang tehnik yustisial terutama tentang penyusunan surat gugat/permohonan dengan peristiwa hukum yang sering digunakan dalam praktik beracara di Peradilan Agama

Indonesian Private International Law - Afifah Kusumadara 2021-03-25

This book is the leading reference on Indonesian private international law in English. The chapters systematically cover the whole of Indonesian private international law including commercial matters, family law, succession, cross-border insolvency, intellectual property, competition (antitrust), and environmental disputes. The chapters do not merely cover the traditional conflict of law areas of jurisdiction, applicable law (choice of law), and enforcement. The chapters also look into conflict of law questions arising in arbitration and assess Indonesian involvement in the harmonisation of private international law globally and regionally within ASEAN. Similarly to the other volumes in the Studies in Private International Law - Asia series, this book presents the Indonesian conflict of laws through a combination of common and civil law analytical techniques and perspectives,

providing readers worldwide with a more profound and comprehensive understanding of the subject.

Kedudukan, kewenangan, dan acara peradilan agama - M. Yahya Harahap 1990

Status, function, and procedures of the administration of justice in Islamic legal disputes; commentary on the new law of 1989.

HUKUM ACARA PERADILAN ELEKTRONIK PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA -

M. Adiguna Bimasakti (editor); Rinaldi Rosba; Harsya Mahdi; M. Zainal Abidin; Spyendik Bernadus B.;

HUKUM ACARA PERADILAN ELEKTRONIK PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA PENULIS: M. Adiguna Bimasakti (editor); Rinaldi Rosba; Harsya Mahdi; M. Zainal Abidin; Spyendik Bernadus B.; Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 9-786237-701361 Terbit : Desember 2019

www.guepedia.com Sinopsis: Dalam dekade ini, tepatnya pada akhir 2018 Mahkamah Agung memperkenalkan sistem peradilan elektronik yang mengubah paradigma beracara di peradilan perdata, perdata agama dan Tata Usaha Negara melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Pergeseran paradigma ini mengubah sebagian besar praktik beracara di peradilan, termasuk peradilan tata usaha Negara yang semula dilaksanakan secara konvensional, kini telah hampir seluruhnya menggunakan Sistem Informasi Pengadilan berupa e-Court, dengan proses beracara yang disebut peradilan elektronik atau e-Litigasi. Selain itu, Ketua Mahkamah Agung RI telah mengamanatkan bahwa per 1 Januari 2020 e-Court harus diterapkan di seluruh pengadilan. Oleh karena itu buku ini mencoba membahas secara komprehensif mengenai seluk-beluk peradilan elektronik yang saat ini pengaturannya terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, serta legitimasi keberlakuan hukum acara yang diatur di dalamnya, terutama berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508

Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Hukum Acara Perdata - 2017-08-01

Buku ini sangat lengkap memuat secara komprehensif dan terperinci hal-hal yang tidak pernah diulas oleh penulis lain dalam buku dengan topik sejenis. Berdasarkan pengetahuan teori hukum yang luas dan pengalaman praktik sebagai seorang yang telah meniti karier sebagai hakim selama 40 tahun, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung, penulis telah berhasil menuangkan pemikirannya dengan menggabungkan kedua unsur tersebut (teori dan praktik) ke dalam penulisan buku yang bermutu ini. Dalam Edisi Kedua, buku ini berisikan tentang tata cara (prosedur) beracara di pengadilan perdata, yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 17 (tujuh belas) bab (ada tambahan tiga bab baru, yaitu bab empat sampai bab enam) dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru. Bab pertama membahas tentang surat kuasa mengenai pengertian, jenis, dan bentuknya. Bab dua, Bab tiga, dan Bab tujuh mengkaji tentang surat gugatan termasuk gugatan perwakilan kelompok (class action). Bab empat tentang masuknya Pihak Ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan. Bab lima tentang Lingkup Gugatan Citizen Lawsuit. Bab 6 tentang prejudicieel geschil antara perkara perdata dengan perkara pidana. Bab delapan tentang kekuasaan mengadili yang dimiliki hakim. Bab sembilan tentang tata cara pemanggilan dan proses yang mendahulukannya. Bab sepuluh tentang putusan akta perdamaian dikaitkan dengan sistem mediasi. Bab sebelas tentang penyitaan meliputi sita atas kapal laut dan kapal terbang. Bab dua belas tentang proses acara verstek. Bab tiga belas tentang eksepsi dan bantahan. Bab empat belas tentang gugatan rekonvensi. Bab lima belas tentang pembuktian. Bab enam belas tentang pemeriksaan setempat dan pendapat ahli dan terakhir Bab tujuh belas tentang putusan pengadilan. Setelah membaca buku ini, para pembaca akan mendapatkan pengayaan wawasan dan pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum acara perdata secara menyeluruh. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pencari keadilan, praktisi hukum dan umum, serta perkembangan ilmu hukum acara perdata itu sendiri di tanah air.

Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu - Saleh, S.H., M.H., dkk. 2022-08-23

Buku ini membahas Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu meliputi latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya; peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu; Perbedaan lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya; Pedoman Mekanisme hukum Acara Sidang Etik; Pembuktian; dan Putusan DKPP. Buku ini diilhami oleh pengalaman penulis yang sering kali diminta menjadi kuasa hukum untuk mengajukan pengaduan di DKPP disertai dengan beberapa contoh kasus. Hal ini diperlukan mengingat hukum acara di Dewan kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang masih baru, belum dikenal oleh khalayak luas.
HUKUM UNTUK KEADILAN DENGAN BERBAGAI UPAYA IMPLEMENTASINYA - M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H., dkk. 2021-08-06
Buku ini merupakan kumpulan dari hasil pemikiran para hakim muda yang memiliki jiwa sebagai penulis. Mereka adalah hakim muda milenial yang lahir setelah sempat terjadi lost generation karena 7 (tujuh) tahun tidak ada rekrutmen hakim. Kemampuan berfikir kritis ditunjang dengan ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi telah melahirkan hakim generasi baru yang cakap dalam memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan.
Hukum Acara perdata di Indonesia - Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., SU 2019-04-01
Hukum Acara Perdata sebagai hukum formal semakin hari dirasakan semakin penting keberadaannya sebagai bagian dari materi praktik hukum yang harus dikuasai oleh para mahasiswa yang ingin berpraktik sebagai advokat atau praktisi hukum lainnya. Oleh sebab itu, pembelajaran hukum acara perdata di perguruan tinggi tidak cukup bagi mahasiswa hanya mempelajari norma hukum dan materi yang bersifat teoretik semata. Maka, pembelajaran hukum acara perdata harus dibekali dengan hal-hal yang bersifat praktik. Pengalaman penulis sebagai pengajar hukum acara perdata selama sepuluh tahun lebih telah membuktikan betapa sulitnya para mahasiswa ditugaskan untuk membuat dokumen hukum yang bersifat keterampilan praktis seperti

membuat contoh gugatan, permohonan, verzet, memori kasasi, dan sebagainya. Hal itu wajar karena pada berbagai buku hukum tidak dijumpai contoh-contoh surat dan dokumen hukum yang diperlukan. Untuk itulah di dalam buku ini disuguhkan beberapa contoh praktis dari materi hukum acara perdata sebagai bagian metode mengajarkan kepada mahasiswa tentang bagaimana beracara di depan pengadilan Buku persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup

Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia - Gusri Putra Dodi, S.H., M.H. 2022-08-01

Buku ini membahas secara umum tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa secara umum, mulai dari sejarah arbitrase itu sendiri sampai dengan pelaksanaan isi putusan arbitrase. Pembahasan dalam buku ini dibagi ke dalam 14 BAB Pembahasan, yang tentunya dengan referensi-referensi yang memadai. Adapun pembagian ke-14 BAB Pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

PENDAHULUAN ARBITRASE HUKUM
PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA DAN JENIS-
JENISNYA BANI SEBAGAI LEMBAGA
ARBITRASE DI INDONESIA HUKUM ACARA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA
ARBITRASE DI BANI PEMBUKTIAN DALAM
ARBITRASE PILIHAN HUKUM, PILIHAN
FORUM, DAN PILIHAN BAHASA DALAM
ARBITRASE PEMILIHAN ARBITER HAK
INGKAR DALAM ARBITRASE Buku
persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
#PrenadaMedia

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata - Prim Haryadi 2022-05-18

Buku ini mengajak kita untuk memahami secara komprehensif, bagaimana perjuangan dalam proses pemulihan lingkungan hidup dilakukan dalam teori dan praktik di peradilan, serta sejauh mana hakim di Indonesia dapat berperan dalam proses tersebut melalui putusan yang dijatuhkannya. - Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI Buku ini memberikan pengetahuan hukum secara teoretis dan praktis tentang penyelesaian sengketa lingkungan keperdataan. Isu-isu hukum seperti hak gugat, hukum pembuktian dalam penerapan strict liability, dan penghitungan ganti kerugian dalam pemulihan lingkungan, ditulis secara detil dan

komprehensif. Buku ini memiliki nilai tambah karena substansinya sangat padat dengan analisis implementasi dan penegakan hukum. Buku ini bermanfaat sebagai referensi penting bagi komunitas hukum maupun masyarakat umum di Indonesia. - Dr. Mas Achmad Santosa SH., LL.M. Pendiri/Direktur Eksekutif pertama Indonesian Center for Environmental Law (ICEL); Pendiri dan CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), dan Pengajar Hukum Lingkungan di FHUI. Buku ini menjelaskan peran hakim dalam pembaruan dan pembentukan hukum lingkungan di Indonesia. Melalui buku ini, kita memperoleh pemahaman mendalam beberapa konsep dalam hukum lingkungan, seperti pertanggungjawaban mutlak, perbuatan melawan hukum, pembuktian, dan penghitungan kerugian lingkungan, berkembang melalui putusan pengadilan. Sebuah buku penting yang akan memperkaya dan mempertajam pemahaman mengenai hukum lingkungan, terutama berbagai aspek terkait environmental torts. - Prof. M.R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D. Guru Besar Hukum Lingkungan FHUI

PENGANTAR HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA - WALUYO SLAMET PRADOTO 2022-02-01

Buku pegangan praktikum Hukum Acara Peradilan Agama ini bukan sebuah hal sempurna, oleh karenanya membutuhkan banyak evaluasi dan masukan, sehingga buku pegangan ini menjadi sebuah buku pegangan yang tetap bisa digunakan keberadaannya secara akademik.

PENGANTAR HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA - Khelda Ayunita 2022-03-09

Kompleksitas kewenangan Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam mengiringi aktivitas masyarakat, sehingga dengan kewenangan yang luas ini memungkinkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya lembaga lain yang mengontrol tindakan Pejabat Administrasi Negara tersebut. Di dalam teori trias politika Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang eksekutif secara yuridis di control oleh lembaga yudikatif yaitu

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tujuan control tersebut adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pejabat Administrasi Negara itu sendiri. Selain itu dalam rangka penegakan Hukum Administrasi Negara dalam mewujudkan kinerja Pemerintahan yang baik, professional, berwibawa serta akuntabel. Buku ini menyajikan tentang konsep dasar Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia yang berdasarkan pada konsep Negara Hukum. Semua tindakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus berlandaskan peraturan perundang-undangan dalam mengiringi aktivitas masyarakat dalam semua sendi kehidupan bermasyarakat. Selain itu, buku ini jg menyajikan tentang karakteristik beracara di Peradilan Tata Usaha Negara yang di ulas dalam kajian teori, asas dan peraturan undang-undangan selain Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara penulis juga menyajikan ulasan tentang Undangundang Administrasi Pemerintahan. Buku ini ditulis dalam rangka memenuhi kebutuhan refrrensi yang dapat di pakai oleh berbagai kalangan yang ingin menambah khasanah keilmuan mengenai sejarah, karakteristik dan proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana namun mudah dipahami dan diharapkan buku ini mudah dimengerti bagi para pembaca yang ingin mengetahui mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali - Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. 2017-01-12

Sebagian besar kalangan teoritisi dan praktisi hukum masih memiliki persepsi bahwa lembaga Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum biasa atau upaya hukum keempat setelah upaya hukum kasasi, konstruksi pola berpikir para hakim agung yang ditunjuk sebagai majelis Peninjauan Kembali oleh sebagian para teoritisi dan praktisi hukum juga dianggap masih sebagai yudex yuris. Padahal lembaga Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa, ditangani dengan acara luar biasa, oleh Majelis Hakim PK yang luar biasa, karena hakim Agung yang selama ini sebagai yudex yuris yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai majelis Hakim Peninjauan Kembali, maka sejak saat itu telah menjelma menjadi

Hakim Yudex Facti yang memiliki kewenangan untuk menilai kualitas dan derajat pembuktian terhadap alat bukti baru yang dihadirkan dalam forum Majelis PK tersebut. Jadi, dalam proses pemeriksaan dan mengadili perkara PK, Hakim Agung Majelis PK harus memosisikan dirinya sebagai hakim yudex facti yang dituntut mampu mengerahkan segala pengetahuan dan kemampuan teknisnya, kemudian melakukan analisis secara induktif terhadap alat bukti, melakukan kualifikasi dan penilaian terhadap alat bukti, serta mampu berjuang secara sungguh-sungguh mempertemukan, mendamaikan, dan mengharmonisasikan kepastian hukum dan keadilan hukum. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti (Inkracht van gewijsde) sebagai data primer yang harus dihargai sebagai data yang memiliki kualifikasi kepastian hukum. Sementara alat bukti baru Novum harus dipandang sebagai data primer yang memiliki dimensi keadilan hukum dengan sengaja dihadirkan untuk menuntut ditegakkannya keadilan, maka di sinilah Majelis Hakim PK dituntut mampu mengharmonisasikan keduanya dalam putusan PK. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
Climate Change Liability - Richard Lord
2011-12-01

As frustration mounts in some quarters at the perceived inadequacy or speed of international action on climate change, and as the likelihood of significant impacts grows, the focus is increasingly turning to liability for climate change damage. Actual or potential climate change liability implicates a growing range of actors, including governments, industry, businesses, non-governmental organisations, individuals and legal practitioners. Climate Change Liability provides an objective, rigorous and accessible overview of the existing law and the direction it might take in seventeen developed and developing countries and the European Union. In some jurisdictions, the applicable law is less developed and less the subject of current debate. In others, actions for various kinds of climate change liability have already been brought, including high profile cases such as Massachusetts v. EPA in the United States. Each chapter explores the potential for and barriers to climate change

liability in private and public law.

Asas-Asas Hukum Acara Perdata - Dr. Dwi Handayani, S.H., M.Hum. 2022-06-21

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 1 ayat 3 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Atas dasar tersebut, maka seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus selalu berlandaskan kepada hukum. Untuk menjamin keamanan dan keteraturan hidup bermasyarakat di Indonesia, maka seluruh rakyat wajib untuk menaati peraturan hukum yang didasarkan pada suatu system hukum yang berlaku. Buku ini akan memberikan informasi yang lengkap untuk lebih memahami sistem hukum Indonesia, baik dari segi sejarah, tujuan, unsur, dan jenisnya. Buku ini juga memberikan informasi pengantar mengenai hukum internasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya memiliki ciri local, namun juga mengakomodasi prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional.

Optimalisasi Mediasi Perkara Waris - Soraya Parahdina 2022-12-19

Buku ini berisi Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang memberikan gambaran kepada kita akan adanya praktik pelaksanaan mediasi yang dipahami secara berbeda baik terhadap perintah mediasi, lama waktu mediasi, ketidakberhasilan mediasi, penjatuhan putusan sela, dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Tinggi Agama. Semoga dengan sajian tulisan ini dapat memberikan nilai tambah agar pengaturan terkait mediasi ke depannya menjadi lebih jelas, tegas, dan komprehensif.

IWLEG 2022 - Tri Laksmi Indreswari 2023-01-09

We proudly present the proceedings of 1st International Workshop on Law, Economic and Governance 2022 (IWLEG 2022). It focuses on how the wave of digitalization of government transformation, especially in Law and Democracy, Law and Indigenous People, Law in Contemporary Issues, Law and Economics, Digital Economics, Good Governance etc. As we know, the world today is changing and the world we are facing now is the one where everything is connected. The contemporary social issues based on complex problems, complex interest,

beyond borders and powers. More than 74 manuscripts from various countries were presented at this conference with around 39 of them selected to be published in proceedings. We hope by this workshop, discussions on how research on Law, Economic and Government is possible in a disruptive era will give a perspective for the social and humanities studies development.

Hüküm Acara Peradilan Pajak - M. Farouq S., A.Md., S.E., S.H., S.H.I., Bkp. 2022-11-01
Hukum acara Peradilan Pajak merupakan bentuk jaminan hak bagi WP dan Fiskus untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dihadapinya, di samping menjadi rujukan bagi Hakim Pengadilan Pajak (PP) selaku *judex factie* selama dalam proses mengadili sengketa yang mencakup bagaimana; (i) memeriksa perkara berdasarkan fakta atau peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya sengketa beserta alat-alat bukti yang diungkap di persidangan, mendistribusikan beban dan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian (uji bukti yuridis & administratif via matriks sengketa) dari para pihak; (ii) memutus perkara dengan meng-konstatir dalil-dalil hukum ke dalam peristiwanya yang konkret, menerapkan (mengkonstituir) hukumnya berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang relevan disertai alat bukti yang cukup serta berdasarkan keyakinan hakim; dan (iii) memenuhi syarat sah dan wajibnya sebagai putusan yang berkuatan hukum tetap (*inkracht van gewjisde*), yakni mempunyai kekuatan hukum mengikat (*binderide kracht*), kekuatan pembuktian (*bewijszende kracht*) dan bersifat eksekutorial (*eksecutoriale kracht*), sehingga dapat dilaksanakan oleh para pihak. Secara prinsip maupun teknis, terdapat serangkaian syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi dalam beracara (menyelesaikan sengketa) di PP, yang dalam hal ini menjadi panduan teknis litigasi bagi para pihak (WP dan Fiskus) bagaimana cara mengajukan dan merancang berkas sengketa Banding dan Gugatan, Surat Uraian Banding (SUB) dan Bantahan, Surat Tanggapan, matriks sengketa, dan Menyusun Kesimpulannya (conclusion) dengan baik. Dengan memadukan asas hukum acara yang berlaku di PTUN yang merupakan induk hukum administrasi secara umum (*ordinative law*) dan menerapkan asas *lex*

spesialis yang berlaku di PP sebagai turunan hukum administrasi secara khusus di bidang perpajakan (sub-ordinative law), akan menambah kompilasi keahlian kita menjadi integratif yang mencakup bagaimana sebenarnya “mode” teknis litigasi yang yang akomodasi dalam hukum acara Peradilan Pajak. Di samping itu, mengingat PP sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan PTUN, maka dalam buku ini diberikan pula studi komparatif bagaimana mekanisme yudisial yang berlaku PTUN dan di semua Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA), termasuk dalam penerapan asas-asas hukum acaranya yang relevan, agar diperoleh gambaran bagaimana seharusnya putusan Hakim PP itu dapat memberikan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan secara lebih substantif di bidang perpajakan, bukan demi politik anggaran pendapatan negara semata. Semoga buku ini dapat melengkapi literasi ilmu hukum acara Peradilan Pajak yang telah ada dan bermanfaat bagi segenap stakeholder-nya meliputi para Akademisi (Dosen, Mahasiswa, dan Pemerhati Kebijakan Publik), Masyarakat WP (Pengusaha, Karyawan bidang keuangan, akuntansi, administrasi fiskal, dan corporate legal, Fiskus pada Pemerintah Pusat dan Daerah, Para Hakim dan Panitera di PP dan MA, serta bagi segenap para praktisi hukum (konsultan hukum bisnis dan advokat), khususnya bagi para Konsultan Pajak, Kuasa Hukum Pajak dan Bea Cukai, serta para Akuntan, meskipun mereka tidak berlatar belakang pendidikan tinggi ilmu hukum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia - Hj. Sulaikin Lubis, S.H., M.H., et al. 2018-01-01

Dalam cetakan terbaru buku HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA terdapat perbaikan teknis penulisan serta penambahan isi di beberapa bab, yaitu pada Bab 4, 7, 9, 10, 12, dan 13. Pada Bab 4 ditambahkan penegasan mengenai hukum formal dan hukum materiel bagi Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darrussalam (NAD) dan terdapat singgungan sedikit terhadap kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah sehubungan dengan disahkannya UU No. 19

Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet - Iswi Hariyani, S.h., M.h 2013-02-12

Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet telah lazim dilakukan di dunia perbankan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada diskriminasi karena fasilitas semacam ini lebih banyak diberikan kepada debitur besar. Debitur mikro dan debitur kecil yang kebanyakan nilai agunannya jauh lebih besar dibandingkan nilai kreditnya justru sering kali tidak diberi fasilitas tersebut. Mereka lebih sering dipaksa melunasi kredit yang macet secara tunai atau melalui pelelangan agunan yang dipaksakan. Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. Dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (2) huruf e UU 10/ 1998 tentang Perbankan, secara jelas diatur tentang larangan diskriminasi dalam pemberian kredit perbankan. Restrukturisasi kredit-sesuai PBI 7/ 2005 Pasal 1 angka 25-merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: (a) penurunan suku bunga kredit, (b) perpanjangan jangka waktu kredit, (c) pengurangan tunggakan bunga kredit, (d) pengurangan tunggakan pokok kredit, (e) penambahan fasilitas kredit, dan (f) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi kredit umumnya diarahkan untuk menyelamatkan kredit bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet). Kebanyakan nasabah debitur, khususnya debitur mikro dan debitur kecil, tidak tahu tentang seluk-beluk pemberian fasilitas restrukturisasi dan penghapusan kredit macet di perbankan. Akibatnya mereka memiliki kedudukan yang lebih lemah dan sering kali kesulitan mengakses fasilitas tersebut. Padahal, kedua fasilitas tersebut telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI 7/ 2005. Di samping itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan PP 14/ 2005 dan PP 33/ 2006 yang antara lain mengatur program penghapusan kredit macet di bank BUMN. Melalui PP 14/ 2005 dan PMK 31/ 2005, debitur

UMKM di bank BUMN mendapatkan fasilitas hapus tagih disertai pemberian potongan pokok utang hingga 50%% (jika masih punya jaminan kebendaan) dan 15%% (jika sudah tidak punya jaminan kebendaan). Pimpinan bank BUMN juga menjanjikan potongan pokok hutang 25%% bagi debitur kredit macet yang harus diselesaikan melalui PP 33/ 2006. Penyelesaian kredit macet di bank BUMN melalui PP 14/ 2005 menggunakan ?mekanisme negara? sehingga masih melibatkan PUPN. Di lain pihak, PP 33/ 2006 sudah menggunakan ?mekanisme korporasi? sehingga bank BUMN dapat menyelesaikan kredit macet secara mandiri tanpa melibatkan PUPN. Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet merupakan tindakan yang sudah lazim dilakukan di kalangan perbankan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah (non- performing loan) agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga dengan baik. Meskipun demikian, program restrukturisasi dan penghapusan kredit macet harus dilaksanakan secara benar sesuai aturan hukum yang berlaku agar tidak sampai menimbulkan moral hazard yang dapat merugikan pihak bank, debitur, dan masyarakat. Di masa kini, restrukturisasi dan penghapusan kredit macet secara umum telah diatur secara jelas dalam UU Perbankan (UU 10/1998), Peraturan Bank Indonesia (PBI 7/2005), dan dalam pedoman perkreditan di masing-masing bank. Penghapusan (write-off) terhadap kredit macet adalah bagian tak terpisahkan dari manajemen risiko penyaluran kredit perbankan. Penghapusan kredit macet terdiri atas dua tahap, yaitu : (a) Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau conditional write-off, dan (b) Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau absolute write-off. Dalam program hapus buku, portofolio kredit macet dikeluarkan dari pembukuan bank, namun pihak bank masih tetap melakukan penagihan atas kredit macet tersebut. Jika program hapus buku tidak berhasil dan proses penagihan sulit dilakukan, maka manajemen bank dapat membuat program hapus tagih sehingga portofolio kredit macet tersebut tidak perlu ditagih lagi. Hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit macet baru boleh dilaksanakan jika pihak bank telah berupaya keras

Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya -

Ramiyanto, S.H.I., M.H. 2019-01-29

Dalam praktik peradilan pidana sering kali pihak yang berkepentingan tidak menerima putusan yang dijatuhkan hakim di sidang pengadilan karena dipandang tidak atau kurang adil. Akibatnya, pihak yang berkepentingan berupaya untuk melawan putusan pengadilan tersebut atau yang disebut dengan upaya hukum. Di dalam hukum acara pidana terdapat beberapa jenis upaya hukum yang dapat digunakan untuk melawan putusan pengadilan (termasuk penetapan pengadilan). Buku dengan judul *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di dalam Hukum Positif dan Perkembangannya* karangan Ramiyanto, S.H.I., M.H., ini mencoba untuk membahas upaya-upaya hukum perkara pidana secara gamblang dan komprehensif. Harapannya agar para pembaca dapat memahami upaya-upaya hukum yang disediakan hukum acara pidana. Keunggulan dari buku ini adalah pembahasannya tidak hanya merujuk pada ketentuan di dalam KUHAP, tetapi juga merujuk pada undang-undang khusus. Selain itu, pembahasan dalam buku ini pun merujuk pada praktik peradilan (yurisprudensi) dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Buku ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi para akademisi dan praktisi hukum, mahasiswa hukum strata satu (S-1) yang sedang mnengambil mata kuliah Hukum Acara Pidana, serta masyarakat luas yang berminat mempelajari upaya hukum perkara pidana, atau masyarakat yang hendak menggunakan upaya hukum perkara pidana. Akhir kata, selamat membaca dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat. Buku persembahkan penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata - M. Yahya Harahap, S.H. 2023-01-31

Tebal, padat berisi, luas, dan lengkap, kata-kata itulah yang menjadi keunggulan buku ini dalam upaya memperkaya khazanah literatur hukum di tanah air. Betapa tidak, buku ini merupakan refleksi dan ekspresi penulis sebagai mantan hakim selama 40 tahun tentang bagaimana menegakkan prinsi keadilan (fairness) dan keseimbangan (balance) bagi pemohon dan termohon eksekusi dalam proses eksekusi bidang perdata. Pada garis besarnya, buku ini berisikan pembahasan yang komprehensif dan intergral tentang ruang lingkup eksekusi

perdata yang dituangkan dalam 16 (enam belas) bab. Bab 1 Pengertian dan Asas Eksekusi Bab 2 Perbedaan Eksekusi Riil Dengan Eksekusi Bab 3 Peringatan, Penetapan, dan Berita Acara Eksekusi Bab 4 Eksekusi Riil Bab 5 Eksekusi Pembayaran Uang Bab 6 Penjualan Lelang (Lelang Eksekusi) Bab 7 Eksekusi Jaminan Kredit Bab 8 Eksekusi Terlebih Dahulu Bab 9 Eksekusi Peternak Beberapa Putusan Bab 10 Eksekusi Putusan Perdamaian Bab 11 Penundaan Eksekusi Bab 12 Eksekusi Yang Tidak Dapat Dijalankan (Noneksekutabel) Bab 13 PUPN Memiliki Parate Eksekusi Bab 14 Biaya Eksekusi Bab 15 Beberapa Masalah Kasus Eksekusi Bab 16 Lemaga Paksa Badan (Gijzeling) Semuanya dikupas tuntas secara terperinci dengan bahasa yang jelas dan lugas disertai dengan contoh-contoh yurisprudensi atas kasus-kasus terdahulu. Semoga buku ini dapat memberi kontribusi pemikiran terhadap perkembangan dunia hukum di tanah air. Selamat membaca

The UNCITRAL Model Law and Asian

Arbitration Laws - Gary F. Bell 2018-10-31

In the Asia-Pacific, thirty-eight jurisdictions have adopted the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. This book looks at how the text and the principles of the Model Law have been implemented (or not) in key Asian jurisdictions. Most of the jurisdictions covered in this book have declared that they have adopted the Model Law but often with significant modifications. Even when jurisdictions adopt some provisions of the Model Law verbatim, their courts may have interpreted these provisions in a manner inconsistent with their goals and with how they are interpreted internationally. When a jurisdiction has not adopted the Model Law, the chapter compares its legislation to the Model Law to determine whether it is consistent with its principles. Each

chapter follows the structure of the Model Law allowing the reader to easily compare the arbitration laws of different jurisdictions on each topic.

HUKUM ACARA PERADILAN NIAGA Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU dan Kekayaan Intelektual - Herwastoeti 2020-03-11

Hal-hal yang berhubungan dengan bisnis menuntut penyelesaian yang cepat dan dinamis, termasuk proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui nonlitigasi dan litigasi. Saat sengketa bisnis harus diselesaikan secara litigasi, menjadi dilema tersendiri mengingat prosesnya memakan waktu yang lama dan kepastian yang terkatung-katung terhadap putusan tentu sangat merugikan bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, dibentuklah Pengadilan Niaga pertama kali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang tentang Kepailitan yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di Jakarta Pusat. Pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus dibawah lingkungan badan peradilan umum menyelesaikan sengketa-sengketa dibidang niaga yang berhubungan dengan Kepailitan dan Penunduaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sengketa Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Sengketa Likuidasi Bank Anggota Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan adanya pembatasan waktu penyelesaian sengketa, ditiadakannya upaya hukum banding dan karakteristik khusus lain yang tidak dimiliki pengadilan lainnya, diharapkan pengadilan niaga selain dapat menyelesaikan sengketa bisnis yang ada, dapat juga mengakomodasi kebutuhan bisnis sehingga sengketa bisnis yang sedang diupayakan penyelesaiannya tidak mengganggu aktifitas bisnis lainnya para pihak yang bersengketa.